

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peranan Pengendalian Kredit Guna Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. BPR KERTAMULIA, Bandung)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prosedur pemberian kredit pada PT. BPR KERTAMULIA secara teoritis telah sesuai dan memadai, yaitu:

a. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap awal ini calon kreditur akan mengajukan permohonan kreditnya kepada bank, kemudian calon debitur akan memberikan data diri dan data jaminan yang menjadi syarat pengajuan kredit. Data tersebut kemudian akan diperiksa kebenarannya oleh *surveyor*.

b. Tahap Pembahasan Kredit

Pada tahap kedua ini *surveyor* dan *supervisor* akan membahas semua data yang telah didapatkan dari calon debitur untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara teratur.

c. Tahap Keputusan Permohonan Kredit

Tahap yang menentukan calon debitur akan mendapat persetujuan atau penolakan dari direktur atas permohonan kredit yang diajukan.

d. Tahap Pencairan Kredit

Pada tahap ini jika calon debitur yang disetujui permohonan kreditnya akan mencairkan dananya melalui kasir.

e. Tahap Pengawasan dan Pembinaan Kredit

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank harus melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individu per debitur, untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak

f. Tahap Penyelesaian Kredit

Tahap penyelesaian kredit adalah tahap pelunasan segala kewajiban debitur terhadap bank, yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perjanjian kredit.

2. Pengendalian kredit P.T. BPR KERTAMULIA sangat berperan dalam pemberian kredit, dapat dibuktikan dari hasil persentase jawaban kuesioner yang didapat yaitu sebesar 76,25% dan dengan adanya proses pengendalian dalam pemberian kredit pada PT. BPR KERTAMULIA, yaitu:

a. Pengecekan Data oleh *Surveyor*

Surveyor akan melakukan pengecekan data-data yang diberikan oleh calon debitur. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang diberikan oleh calon debitur telah benar atau belum. Ada dua jenis pengecekan pengecekan data debitur dan pengecekan data jaminan.

b. Pengecekan *On The Spot* oleh *Surveyor*

Dalam pengecekan *on the spot*, *surveyor* akan langsung mendatangi dan melihat langsung lokasi. Metode pengecekan dilakukan dengan melakukan tanya jawab atau wawancara.

c. Laporan Kredit (Proposal Kredit) Disampaikan oleh *Surveyor* Kepada *Supervisor* atau Kepala Bagian

Setelah melakukan pengecekan dan semua data yang ada telah sesuai *surveyor* akan membuat laporan kredit atau proposal kredit. Laporan kredit ini kemudian diserahkan kepada *supervisor*. Setelah mengecek data jaminan dan data debitur *supervisor* akan merekomendasikan kepada direktur proposal pengajuan kredit.

d. Direktur Menganalisis Nilai Jaminan

Direktur akan memberikan persetujuan bila proposal pengajuan kredit telah lengkap dan sudah direkomendasikan oleh *supervisor*. Tugas direktur ditahap ini yaitu menilai jaminan calon kreditur memperkirakan nilai dan jumlah yang akan diperoleh jika jaminan tersebut diuangkan.

e. Proposal Kredit yang Sudah Disetujui Diperiksa oleh Bagian Administrasi Kredit

Langkah terakhir dalam proses pengendalian pemberian kredit PT. BPR KERTAMULIA ini adalah Bagian Administrasi Kredit akan mengecek kembali semua data calon debitur dan data jaminan, lalu mengecek laporan data debitur telah disetujui atau belum dan mengecek Laporan Kredit telah disetujui oleh direktur atau belum.

Dari hasil dan pembahasan, penulis menemukan beberapa kelemahan pada PT. BPR KERTAMULIA, yaitu:

- a. PT. BPR KERTAMULIA menerapkan pengendalian pemberian kredit yang masih belum terlalu tegas dalam menerima permohonan kredit calon debitur sehingga masih terjadinya kredit macet, hal ini dikarena bank tidak mengevaluasi dan menganalisis penyimpangan saat debitur tidak mampu membayar angsurannya yang dapat mengakibatkan hal yang sama terulang kembali dimasa depan.
- b. PT. BPR KERTAMULIA juga belum ada restrukturisasi organisasi untuk memperjelas dan membuat kedudukan pengawas perkreditan dalam bagan organisasi tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dengan pengetahuan yang masih sangat terbatas, penulis mencoba untuk memberikan saran diharapkan akan memberikan masukan, sebagai berikut:

1. Agar pengendalian kredit yang dihasilkan semakin efektif dan penyimpangan yang terjadi di tahun berikutnya bisa lebih kecil, untuk itu pengendalian kredit PT. BPR KERTAMULIA harus ditingkatkan lagi dengan mengevaluasi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi antara realisasi pemberian kredit dengan standar pemberian kredit yang telah ditetapkan secara teliti dan akurat.
2. PT. BPR KERTAMULIA lebih tegas dalam pengendalian kredit sebagai salah satu upaya mengurangi penyimpangan pada pemberian kredit dan kredit macet.
3. PT. BPR KERTAMULIA sebaiknya perlu mengadakan restrukturisasi organisasi untuk memperjelas kedudukan pengawas perkreditan dalam bagan organisasi tersebut. Pengawas perkreditan pada P.T. BPR KERTAMULIA dilaksanakan oleh administrasi kredit yang juga bertugas menyelenggarakan kredit dengan demikian terdapat fungsi ganda dari tugas akuntansi yang sebaiknya dibebankan pada pengawas khusus bukan dibebankan pada administrasi kredit yang menjadi memiliki jabatan rangkap dan menyebabkan pembebanan tugas yang

terlalu berat pada akuntansi. Oleh karena itu penulis memberikan saran agar fungsi akuntansi dipisahkan, dengan demikian bagian administrasi kredit dapat menjalankan fungsinya dengan baik di masa yang akan datang.